



LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI DALAM RANGKA PENGELOLAAN PENDIDIKAN MADRASAH DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2021 - 2022
TANGGAL, 29 - 31 MARET 2022**



**SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
BAB II	PELAKSANAAN KUNJUANGAN KERJA SPESIFIK	5
BAB III	TEMUAN DAN REKOMENDASI	8
BAB IV	PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik, pada masa persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 Tanggal 29-31 Maret 2022 ke Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Tata Tertib DPR RI:
 - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
 - b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan; dan
 - c. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI.
4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
 - a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - c. Menggali dan menyerap aspirasi dari Jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, masyarakat stakeholder terkait lainnya tentang Pengelolaan Pendidikan keagamaan.
2. Tujuan
 - a. Secara umum untuk mendapatkan masukan berupa data faktual tentang kebijakan pengelolaan pendidikan keagamaan di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya madrasah.
 - b. Secara khusus untuk memperoleh informasi dan data akurat mengenai perkembangan dan kemajuan pengelolaan pendidikan Madrasah di Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Anggota Tim

NOMOR		N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
URUT	ANGG				
1.	275	Drs. H. HASAN BASRI AGUS, M.M.	Ketua Tim	P G	JAMBI
2.	154	I KOMANG KOHERI	Anggota	PDIP	LAMPUNG II
3.	203	MY ESTI WIJAYATI	Anggota	PDIP	DI YOGYA
4.	225	MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA	Anggota	PDIP	BANTEN I
5.	255	MATINDAS J. RUMAMBI, S.Sos	Anggota	PDIP	SULTENG
6.	280	MOHAMMAD SALEH, S.E.	Anggota	P G	BENGKULU
7.	121	Drs. H. ZAINUL ARIFIN	Anggota	GRNDRA	NTB I
8.	377	ACH FADIL MUZAKKI SYAH, S.Pd.I.	Anggota	NASDEM	JATIM III
9.	552	WASTAM	Anggota	PD	SUMUT II
10.	559	H. HASANI BIN ZUBER, S.IP.	Anggota	PD	JATIM XI
11.	438	Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	Anggota	PKS	JABAR X
12.		AGUS WIDIJATMOKO, S.H.	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
13.		HERU PRIBADI	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
14.		RENO BULAN	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
15.		JODY PRATAMA PUTRA	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
16.		EDI HAYAT, S.Ag., MA	TENAGA AHLI KOMISI VIII DPR RI		
17.		Dr. AGUS SUSANTO, M.A.	TENAGA AHLI KOMISI VIII DPR RI		
18.					

BAB II

PELAKSANAAN KUNSIK KOMISI VIII KE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pelaksanaan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Palangkaraya dilaksanakan sesuai rencana, yaitu dengan mengadakan pertemuan dan peninjauan. Pertemuan dilakukan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah bersama jajaran dan Komisi VIII DPR RI melakukan peninjauan ke Madrasah Aliyah Negeri Kota Palangkaraya.

A. Pertemuan

Dalam pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah yang bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangkaraya, Komisi VIII DPR RI mendapat penjelasan sebagai berikut:

1. Jumlah madrasah di Kalimantan Tengah sebanyak 690 madrasah yang terdiri dari: 163 RA (semuanya swasta), 277 MI (36 negeri dan 241 swasta), 168 MTs (22 negeri dan 146 swasta), 82 MA (14 negeri dan 618 swasta).
2. Sekolah Kristen di Kalimantan Tengah sebanyak 4 dengan rincian: 1 SD, 2 SMAK, dan 1 SMTK.
3. Sekolah Hindu di Kalimantan Tengah sebanyak 91 dengan rincian: 3 sekolah formal, dan 88 sekolah non formal/sekolah minggu.
4. Sekolah Budha tidak ada di Kalimantan Tengah.
5. di Kalimantan Tengah hanya ada 1 sekolah katolik, yaitu SMAK.
6. Pengelolaan pendidikan madrasah dan pembelajaran tatap muka selama masa Pandemi Covid-19 di lingkungan Kemenag Kalimantan Tengah mengikuti kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah, dengan memperhatikan kondisi / zona masing-masing wilayah, dengan sistem pembelajaran Daring/PJJ maupun tatap muka terbatas, sesuai rekomendasi TIM Satgas Covid. Sekarang, mulai dilaksanakan Pembelajaran tatap muka secara terbatas (PTM).
7. Alokasi dana pada Fungsi Pendidikan untuk 51 satker yang terdiri Dari 1 Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Tengah, 14 Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, 36 Madrasah yaitu Rp. 404.581.909.000 (Empat Ratus Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Rupiah). Jumlah ini merupakan gabungan antara Dana Pengelolaan Pendidikan Agama dan Keagamaan dengan Pendidikan Madrasah. Dimana Dana pendidikan Madrasah Mengelola 78% dari total Pagu.
8. Pada tahun anggaran 2021, terdapat 6 madrasah di Kalimantan Tengah yang mendapat alokasi anggaran dari SBSN, yaitu MAN Barito Utara, MAN 1 Pulang Pisau, MTsN 1 dan MTsN 2 Barito Timur, serta MTsN 1 Kota Palangkaraya. Selain itu, terdapat 3 madrasah pada tahun 2022 yang mendapat alokasi anggaran dari SBSN, yaitu: MTsN Barito Selatan, MTsN 1 Kota Palangkaraya, dan MTsN Lamandau.
9. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan keagamaan khususnya madrasah di Kalimantan Tengah, faktor penghambat diantaranya:

- a. Masih kurang berimbangannya anggaran dari pemerintah pusat untuk membantu sarana dan prasarana madrasah yang jumlahnya sangat banyak di Kalimantan Tengah yang tersebar di 14 kabupaten dan kota;
 - b. Dari sisi SIM data, proses sinkronisasi data Kementerian dengan Dukcapil dan Kemendikbud yang masih belum maksimal.
 - c. Kendala Jaringan yang masih kurang memadai bagi madrasah di daerah pinggiran sungai yang jauh dari kabupaten/kota.
 - d. Transportasi bagi madrasah yang jauh dari wilayah kabupaten / kota cukup menyulitkan siswa maupun tenaga pendidik dan kependidikan.
 - e. MAN Insan Cendekia Kota Palangka Raya hingga saat ini belum operasional dikarenakan pembangunan RKB dan asrama siswa belum selesai (masih mangkrak). Belum selesainya pembangunan MAN Insan Cendekia ini karena sempat terdapat konflik kepemilikan tanah MAN Insan Cendekia dengan masyarakat.
10. Tidak semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki MAN. Bahkan di Kota Palangkaraya hanya memiliki satu MAN, padahal minat masyarakat untuk belajar di MAN sangat tinggi, dan terdapat madrasah Aliyah swasta yang siap untuk dinegerikan.
 11. Di Kalimantan Tengah terdapat kekurangan guru agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha.
 12. Terdapat konflik kepemilikan tanah MIN 4 dan MIN 5 Kota Palangkaraya dengan masyarakat. Tanah-tanah MIN tersebut telah digunakan oleh MIN berdasarkan hibah dari Pemerintah Daerah selama kurang lebih 40 tahun, namun belakangan tiba-tiba ada sekelompok masyarakat mengklaim kepemilikan tanah tersebut.



B. Peninjauan

Komisi VIII DPR RI melakukan peninjauan ke MAN Kota Palangkaraya. Dalam peninjauan tersebut, mendapat informasi bahwa bangunan ruang belajar di MAN Kota Palangkaraya adalah bangunan lama semua. Sedang bangunan yang baru adalah gedung keterampilan. Parahnya lagi, ruang belajar di MAN Kota Palangkaraya tidak mampu menampung calon yang siswa yang mendaftar. Yang mendaftar untuk sekolah di MAN Kota Palangkaraya setiap tahunnya berkisar 500 calon siswa, namun yang dapat ditampung hanya sekitar 300 siswa berdasarkan ketersediaan sarana-prasarana

proses belajar-mengajar. MAN Kota Palangkaraya memiliki keunggulan, yaitu di bidang keterampilan yang meliputi: elektro, peternakan, multimedia, dan tata busana.



BAB III

TEMUAN DAN REKOMENDASI

A. Temuan

Berdasarkan hasil pertemuan Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah bersama jajaran, dan peninjauan ke MAN Kota Palangkaraya, ada beberapa temuan yang didapat, yaitu sebagai berikut:

1. Konflik tanah MIN 4 dan MIN 5 Kota Palangkaraya dan MAN Insan Cendekia Palangkaraya. Konflik tersebut antara madrasah dengan masyarakat. Walaupun secara legal, tanah tersebut milik madrasah namun belakangan tanah tersebut diklaim oleh masyarakat dengan memegang legalitas yang sama.
2. Kekurangan guru agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha yang berstatus ASN.
3. Guru dan tenaga kependidikan madrasah di Kalimantan Tengah masih banyak yang tidak berstatus ASN.
4. Kekurangan madrasah negeri di Kalimantan Tengah. Tidak semua kabupaten/kota yang memiliki madrasah negeri, padahal minat masyarakat tinggi dan telah ada madrasah swasta yang siap dinegerikan.
5. MAN Kota Palangkaraya kekurangan ruangan untuk proses belajar-mengajar. Ruangan yang ada sekarang tidak mampu menampung semua calon siswa yang berminat belajar di MAN Kota Palangkaraya. Selain itu, ruangan belajar yang ada sekarang adalah merupakan gedung lama yang masih terawat baik.

B. Rekomendasi

1. Kementerian Agama RI harus membentuk tim khusus untuk membantu Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Agama Kota Palangkaraya dalam melakukan lobi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Palangkaraya agar konflik tanah MAN Insan Cendekia Palangkaraya dan MIN 4 dan MIN 5 Kota Palangkaraya cepat dapat diselesaikan.
2. Kementerian Agama RI harus memenuhi kebutuhan guru agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha serta guru madrasah yang berstatus ASN, baik PNS atau PPPK di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kementerian Agama RI harus menegerikan madrasah swasta di Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan.
4. Kementerian Agama RI harus memenuhi kebutuhan ruang kelas baru di MAN Kota Palangkaraya, karena minat calon siswa sangat banyak yang hendak sekolah di MAN Kota Palangkaraya, dan di Kota Palangkaraya masih ada 1 MAN.

BAB IV PENUTUP

Demikian laporan mengenai pelaksanaan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Tengah. Harapannya, laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan, temuan dan rekomendasi kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI.

**TIM KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI
KETUA TIM,**

H. HASAN BASRI AGUS